

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus terus menjaga kelangsungan kegiatan operasionalnya, yaitu salah satunya dengan menghasilkan laba yang tinggi, supaya dapat meningkatkan kinerja bank tersebut.

Ketika melihat beberapa tahun silam, industri perbankan di Indonesia sempat mengalami jatuh bangun. Salah satunya adalah saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, yang mengakibatkan banyak bank yang mengalami penurunan kinerja yang disebabkan oleh kredit macet. Dalam Seminar Restrukturisasi Perbankan di Jakarta pada tahun 1998, disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja bank, antara lain :

- a) Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan.
- b) Dampak likuidasi bank-bank 1 November 1997 yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran.

- c) Semakin turunnya permodalan bank-bank.
- d) Banyak bank-bank tidak mampu memenuhi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah.
- e) Manajemen tidak profesional.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melikuidasi 16 bank swasta nasional akibat krisis moneter 1998 tersebut. Tidak berhenti di situ, pada bulan April 1998 pemerintah juga memberhentikan operasi tujuh bank yang kinerjanya kurang baik dan tujuh bank lainnya ditempatkan di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Setelah krisis tersebut, industri perbankan Indonesia perlahan bangkit. Setiap bank terus berusaha memperbaiki sektor internal maupun eksternal guna mampu berkinerja dengan baik. Namun, pada tahun 2008 terjadi lagi krisis, yaitu krisis keuangan global. Beberapa sektor terkena dampaknya seperti bursa saham, nilai tukar dan inflasi, ekspor dan impor, sektor riil dan pengangguran, dan tak terkecuali pada sektor perbankan di Indonesia.

Terkait kondisi perbankan di Indonesia tersebut, maka perlu adanya suatu restrukturisasi di sektor perbankan, karena merupakan hal yang sangat mendesak dan harus secepatnya dilaksanakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, di samping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program

rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.

Untuk memperbaiki fundamental industri perbankan secara nasional dan kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Dalam API, arah dan kebijakan pengembangan industri dimasa datang dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna mencapai kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan meningkatnya fungsi pengawasan bank dan kerjasama dengan otoritas terkait yang disertai dikeluarkannya beberapa peraturan oleh Bank Indonesia dan pemerintah cukup efektif menjaga stabilitas perbankan di Indonesia saat ini. Perbankan berhasil meningkatkan fungsi intermediasinya dan melaksanakan proses konsolidasi perbankan dengan hasil yang positif.

Hal penting yang akan digali dalam penelitian ini adalah bagaimana bank mampu meningkatkan kinerjanya seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan di masyarakat yang ditopang oleh peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Industri perbankan terus mengalami perkembangan, dimana jumlah BPR yang terus meningkat, BPR terus dituntut agar mampu bersaing dengan BPR lainnya. Selain itu, masuknya Bank-bank umum dalam memberi fasilitas kredit ikut menambah persaingan. Namun, di sisi lain BPR tetap unggul dari

Bank-bank umum dan mampu bertahan sampai saat ini, dikarenakan karakteristik BPR yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit, sehingga BPR masih diminati. Selain itu, segmentasi pasar BPR yang memasarkan produknya kepada masyarakat kecil serta UMK diperkirakan menjadi alasan utama kenapa BPR bisa bertahan hingga saat ini.

Maka dari itu, dalam penyaluran kredit, sebuah BPR harus memiliki tingkat kesehatan yang baik guna menciptakan kepercayaan pada nasabah dan bisa menarik banyak debitur. Tingkat kesehatan bank bisa dilihat dari kinerja bank tersebut melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas atau disingkat dengan istilah CAMEL. CAMEL merupakan faktor yang sangat menentukan predikat kesehatan suatu bank. Aspek tersebut satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk menilai keberhasilan perbankan dalam perekonomian dan industri perbankan serta dalam menjaga fungsi intermediasi.

Kriteria tingkat kesehatan bank berdasarkan studi oleh Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM selama 5 tahun (per-Desember 2011) dapat ditemukan dalam dokumen model bisnis BPR yang dapat diunduh dari website BI. Kriteria tersebut disajikan dalam tabel 1.1.

Dapat dilihat dari tabel 1.1, bahwa BPR yang dapat dikatakan sehat atau berkinerja baik adalah BPR yang :

- 1) Memiliki rasio CAR lebih dari 8%.
- 2) Memiliki rasio NPL kurang dari 5%.

- 3) Memiliki rasio ROA lebih dari 1,3%.\
- 4) Memiliki rasio BOPO kurang dari 93,5%.
- 5) Memiliki Cash Ratio lebih dari 4%.
- 6) Memiliki rasio LDR antara 80% - 95%.

Tabel 1.1
Aspek Pengawasan Kesehatan BPR oleh BI

Aspek	Indikator	Nilai
Permodalan	CAR	>8%
Kualitas Aktiva Produktif	NPL	<5%
Rentabilitas	ROA	>1,3%
	BOPO	<93,5%
Likuiditas	Cash Ratio	>4%
	LDR	80% - 95%

Sumber: Dokumen Model Bisnis BPR, www.bi.go.id

Bagi perbankan seperti halnya BPR, masalah kinerja jauh lebih penting dari pada masalah laba. Laba yang besar saja belum dapat menjadi ukuran bahwa bank berkinerja baik. Kinerja merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan sejauh mana BPR tersebut telah sukses. Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya.

Indonesia memiliki banyak wilayah yang berpotensi, khususnya dalam memajukan perekonomian negeri. Dari sabang sampai merauke, tercatat ada 33 provinsi yang tersebar luas. Perhatian dikhususkan pada Pulau Jawa yang

menjadi pusat perekonomian Indonesia saat ini. Ada 5 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. BPR pertama kali berdiri di Pulau Jawa yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa. Sampai sekarang, perkembangan BPR di Pulau Jawa cukup baik. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah BPR yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, BPR juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah karena peran vitalnya dalam penyaluran kredit bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia.

Persaingan antar BPR dan antara BPR dengan Bank umum dalam penyaluran kredit terus meningkat. Dalam hal ini, BPR harus terus mengembangkan sisi internal dan eksternal agar mampu memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam penyaluran kredit, sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kinerja BPR. Menurut Syofyan (2003) dalam jurnal Hutagalung, dkk (2011), profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *return on asset* (ROA) pada industri perbankan. *Return on Assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Selain ROA, dalam mengukur kinerja sebuah bank juga bisa dilihat dari total pendapatan bunga bersih yang diterima, karena hal tersebut merupakan salah satu sektor terpenting bank dalam mendapatkan keuntungan.

Pendapatan bunga bersih bisa diukur dengan rasio *Net Interest Margin* (NIM), dimana untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Sehingga dalam penelitian ini, ROA dan NIM digunakan sebagai ukuran kinerja BPR.

Peneliti mencoba menyajikan persentase ROA di Pulau Jawa pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
ROA Bank Perkreditan Rakyat di Pulau Jawa tahun 2012

Provinsi	ROA
Banten	2.70%
DKI Jakarta	1.12%
Jawa Barat	3.60%
Jawa Tengah	3.16%
DI Yogyakarta	2.16%
Jawa Timur	3.96%

Sumber: Data diolah peneliti, www.bi.go.id

Jika dilihat pada tabel 1.2 tingkat *Return on Asset* (ROA) pada tahun 2012 di provinsi Banten, Jabar, Jateng, Jatim dan DI Yogyakarta sudah baik, karena lebih dari standar kesehatan BPR menurut kebijakan BI yaitu 1.3%. Namun, hal tersebut belum terjadi di provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia. Tingkat ROA di DKI Jakarta sebesar 1.12% dan masih belum sehat menurut kebijakan BI. Maka, perlu diteliti faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja BPR yang dikur dengan ROA. Brigham dan Houston (2009:107) menyatakan bahwa terdapat 3 aspek yang mempengaruhi

profitabilitas yaitu likuiditas, manajemen aktiva, dan manajemen utang. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja BPR yang diukur dengan *Net Interest Margin* (NIM).

Diketahui sumber dari website Bank Indonesia (BI), sampai tahun 2012 terdapat 1047 BPR Konvensional di Pulau Jawa. Karena sebagian besar kegiatan perekonomian Indonesia ada di Pulau Jawa, maka populasi penelitian diambil di pulau tersebut. Selain itu, peneliti mencoba menambah variabel *size* dalam penelitian ini, karena beberapa penelitian terdahulu menyarankan untuk menambahkan variabel ini dalam mengukur profitabilitas (Musyarofatun, 2013). Populasi BPR dalam penelitian ini adalah BPR yang memiliki total aset di atas 10 (sepuluh) milyar, hal ini bertujuan untuk menghindari bias karena perbedaan ukuran (*size effect*) BPR, selain hal tersebut BPR dengan total aset di atas 10 (sepuluh) milyar wajib mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit (Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/20/PBI/2006).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Jawa”**.

1.2 Perumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana masalah kinerja memang sangat penting untuk dibahas. Bahkan, dari sejarah awal berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), permasalahan mengenai kinerja terus terjadi. BPR yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu memberikan kinerja

dengan baik akan berdampak pada kebangkrutan. Maka dari itu, sebuah BPR terus dituntut agar mampu mengelola sisi internal dan eksternal guna menciptakan kinerja yang baik.

Atas dasar rumusan masalah tersebut, peneliti ingin mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja BPR di Jawa. Peneliti menggunakan rasio-rasio keuangan CAMEL dalam penelitian ini. Dimana, kinerja diukur dengan *Return on Assets* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM). Sedangkan *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing loan* (NPL), *loan to deposit ratio* (LDR), efisiensi operasional perusahaan (BOPO) dan *Size* sebagai variabel bebas.

Secara rinci permasalahan penelitian ini dapat diajukan tiga pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

- 1) Apakah rasio CAR, BOPO, LDR, NPL, dan *Size* berpengaruh terhadap ROA?
- 2) Apakah rasio CAR, BOPO, LDR, NPL dan *Size* berpengaruh terhadap NIM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh variabel CAR, BOPO, LDR, NPL, dan *Size* secara parsial maupun simultan terhadap kinerja BPR yang diukur dengan ROA.

2. Untuk menguji s bagaimana pengaruh variabel CAR, BOPO, LDR, NPL, dan *Size* secara parsial maupun simultan terhadap kinerja BPR yang diukur dengan NIM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi Bank Indonesia

Sebagai salah satu pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan mengenai tingkat kesehatan BPR.

2. Bagi BPR

Sebagai pembandingan mengenai pengelolaan BPR yang dapat digunakan untuk mengembangkan masing-masing BPR dimasa yang akan datang.

3. Bagi investor dan pelaku bisnis

Sebagai pertimbangan dalam memilih BPR yang terbaik untuk menunjang bisnis yang akan dilakukan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi karya ilmiah bagi pembaca dan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian sejenis.